

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf (pendidikan) terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin absolut (P_0), memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1) dan juga mampu memperkecil distribusi pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin (P_2) di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara.
2. Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun keatas (ketenagakerjaan) terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin absolut (P_0) di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk model indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) ditemukan bahwa berkurangnya tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun keatas ternyata dapat memperbesar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan juga memperbesar distribusi pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara.
3. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk yang dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduknya (kesehatan) terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin absolut (P_0), memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1) dan juga mampu memperkecil distribusi pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin (P_2) di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara.
4. Peningkatan persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB (fertilitas dan keluarga berencana) ternyata semakin meningkatkan jumlah penduduk miskin absolut (P_0), memperbesar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1) dan juga memperbesar distribusi pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin (P_2) di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB terhadap kemiskinan di

kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan teori. Hasil regresi model dari data menunjukkan signifikansi pengaruh persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB terhadap jumlah penduduk miskin dimana ditemukan adanya hubungan positif tetapi yang seharusnya terjadi adalah hubungan negatif. Dengan demikian ada dugaan bahwa data wanita yang menggunakan alat KB hanya tercatat tetapi secara empiris wanita tersebut tidak menggunakan alat KB.

5. Peningkatan pengeluaran riil per kapita penduduk miskin untuk makanan (konsumsi dan pengeluaran rumah tangga) terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin absolut (P_0), memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1) dan juga mampu memperkecil distribusi pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin (P_2) di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara.
6. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap model persentase penduduk miskin absolut (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah usia harapan hidup (kesehatan) dan angka melek huruf (pendidikan).
7. Rata-rata persentase penduduk miskin absolut (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) Propinsi Sumatera Utara lebih rendah di daerah kota dibandingkan dengan daerah kabupaten.
8. Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang jumlah penduduk miskin absolut (P_0) tertinggi, kesenjangan pengeluaran penduduk miskinnya terhadap garis kemiskinan (P_1) yang juga tinggi serta distribusi pengeluaran diantara penduduk miskinnya (P_2) yang paling tidak merata di Propinsi Sumatera Utara.
9. Kota Binjai merupakan daerah yang jumlah penduduk miskin absolut (P_0) terendah, kesenjangan pengeluaran penduduk miskinnya terhadap garis kemiskinan (P_1) yang juga rendah serta distribusi pengeluaran diantara penduduk miskinnya (P_2) yang paling merata di Propinsi Sumatera Utara.

6.2. Saran Kebijakan

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa rekomendasi kebijakan seperti:

1. Mengingat signifikansi jumlah penduduk yang melek huruf terhadap persentase jumlah penduduk miskin absolut (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Propinsi Sumatera Utara maka diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan secara merata baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan memperhatikan pencapaian wajib belajar 12 tahun, peningkatan tenaga guru baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas yang memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan murid, mengatasi kesenjangan mutu pendidikan di kota dan di desa serta meningkatkan jumlah beasiswa bagi keluarga miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hingga saat ini tercatat sekitar 16,8 persen masyarakat yang tidak sekolah/belum tamat SD di Sumatera Utara, sekitar 58,35 persen guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana (D4/S1) dan sekitar 15,65 persen tenaga pengajar dari SD hingga SMA yang telah disertifikasi. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan kembali guna memperbaiki kualitas pendidikan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Mengingat signifikansi tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun keatas terhadap persentase jumlah penduduk miskin absolut (P_0) di Sumatera Utara maka diperlukan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan pekerjaan yang memprioritaskan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja karena hingga saat ini sektor pekerjaan penduduk di Propinsi Sumatera Utara masih bertumpu pada sektor pertanian dimana lebih dari setengah jumlah penduduknya bekerja di sektor pertanian.
3. Mengingat signifikansi usia harapan hidup penduduk terhadap persentase jumlah penduduk miskin absolut (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Propinsi Sumatera Utara maka diperlukan upaya penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kesadaran akan kesehatan. Disamping usaha-usaha persuasif tersebut diperlukan juga peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesehatan penduduk dengan

mengoptimalkan sarana dan prasarana kesehatan karena hingga saat ini pemerintah Sumatera Utara memiliki permasalahan terhadap sarana kesehatan berupa rumah sakit umum dan swasta dimana telah terjadi penurunan jumlah rumah sakit umum pemerintah sebesar 15 persen dan rumah sakit swasta sebesar 50 persen di suatu daerah. Hal ini dianggap suatu kemunduran yang perlu mendapat perhatian serius untuk selanjutnya.

4. Mengingat signifikansi pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan terhadap persentase jumlah penduduk miskin absolut (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Propinsi Sumatera Utara maka diperlukan upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan rumah tangga miskin dengan lebih memperhatikan aksesibilitas terhadap modal dan keterampilan seperti program kredit yang dirancang khusus untuk suatu kelompok sasaran tertentu yaitu rumah tangga miskin.

6.3. Keterbatasan Penelitian

1. Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal variabel-variabel penjelas indeks persentase penduduk miskin (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Penulis berharap studi empiris masa mendatang dapat dikembangkan dengan menambah variabel penjelas lainnya diluar variabel angka melek huruf (pendidikan), tingkat pengangguran terbuka penduduk umur 15 tahun keatas (ketenagakerjaan), usia harapan hidup (kesehatan), persentase wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB (fertilitas dan keluarga berencana) dan pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan (konsumsi dan pengeluaran rumah tangga).
2. Adanya hubungan positif antara persentase wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang masih menggunakan alat KB dengan kemiskinan yang terjadi di Sumatera Utara diduga sebagai akibat ketidaksesuaian data tercatat dengan bukti empiris sehingga diperlukan penelitian selanjutnya mengenai hal tersebut.
3. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat maka disarankan pada penelitian selanjutnya dilakukan penambahan tahun penelitian.